

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cet. Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Asser's, C, 1923, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Vijfde deel Van Bewijs, bewerkt door Anne Anema, tweede druk*, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Asri, Benyamin dan Thabrani, 1998, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Toeritis dan Praktek)*, Tarsito, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kohar, A, 2000, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- Krisnawati, Emeliana, 2006, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, CV. Utomo, Bandung.
- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11. Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cet:IV, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta.

- Moleong, Loexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Purwaka, I Gede, 2005, *Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepala Desa/Lurah*, UI Press, Jakarta.
- Ramulyo, M. Idris, 1992, *Perbandingan hukum kewarsan islam di pengadilan dan kewarisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Sembiring, M.U., 1989, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemardi, 1995, *Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, Jakarta.
- Subekti, R, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman, Eman, 1985, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung.
- Suparman, Maman, 2018, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Perum Balai Pustaka, Jakarta.
- Tobing, G.H.S Lumbang, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta.

B. Tesis/Jurnal/Artikel

- Ardita, Selvia, Liza Priandhini, Siti Hajati Hoesin, “Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/Pid/2017/PT.DKI)”, Universitas Indonesia, 2019.
- Hanum, Latifah, “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Jayanati, Ratih Tri, “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 72/Pdt.G/PN. Pontianak)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Lativolia, Yulina Citra, “Tinjauan Hukum Pluralisme Kewenangan Pembuatan Dan Bentuk Surat Keterangan Waris Berdasarkan Pembedaan Antara Warga Negara Indonesia Penduduk Asli Dan Warga Negara Indonesia Keturunan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.
- Manan, Bagir, “Beberapa Catatan tentang Penafsiran”, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI Nomor 285 Edisi Agustus 2009*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2009.
- Pribadi, I Made Unggul, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pembuat Keterangan Hak Waris Bagi WNI Keturunan Tionghoa” *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.
- Saputra, Gede Afriliana, “Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, *Jurnal Ilmiah*, Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2015-2016.
- Sari, Ni Ketut Novita, “Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *RechtIdee*, Volume 14, Nomor 2, 2019.
- Setiawan, Wawan, “Kedudukan dan Keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum Menurut Sistem Hukum Dibandingkan dengan Pejabat Tata Usaha Negara”, *Media Notariat* nomor 38-39-40-41, Januari-April-Juli-Oktober, 1996.
- Yumni, Amalina Lalitya Zata, “Surat Keterangan Waris yang Ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Yuriz, Okri Junanda, “Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia

Surat Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 347/PDT/ 2015/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/ Pn.Jkt.Sel.